

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA  
TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN  
KEUANGAN DAERAH  
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)**

**Oleh:**

**Fitratul Aini**

**Pembimbing: Amries Rusli Tanjung dan Lila Anggraini**

*Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

e-mail : [Fitratulaini12@yahoo.com](mailto:Fitratulaini12@yahoo.com)

*Influence of internal control, information technology utilization and quality of  
human resources of local government financial reporting reliability  
(Empirical studies on the Government of Payakumbuh City)*

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the influence of the internal control, information technology utilization, and quality of human resources on the local government financial reporting reability. This study was conducted at SKPD of Payakumbuh city. The population in this study were employed who worked in the SKPD Payakumbuh city (25 government agencies). The sampling method used in this study is purposive sampling method. The respondent in this study is the head of SKPD, the head of financial, treasurer of SKPD and financial staff is a side direct related in the financial management area on government of Payakumbuh city. The sample used in this study were 75 respondents. The hypotheses then tested is multiple linear regression analysis by using SPSS version 20.0. The result of this study indicated that internal control and quality of human resources tend to have effect on local government financial reporting reability. While information technology utilization has no effect on local govermeny financial reporting reability. The magnitude of the effect ( $R^2$ ) internal control, information technology utilization and quality of human resources on the local government financial reporting reability was 35,9%. While the remaining 64,1% is influenced by other independent variabel that are not observed in this study.*

*Keywords :reporting, control, information technology, and human resources.*

**PENDAHULUAN**

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP, Lampiran I: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu:

relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid. Keterandalan pelaporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I: par. 38) merupakan kemampuan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan penyajiannya agar berguna dalam pengambilan keputusan. Demi terselenggaranya keterandalan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada pengendalian intern, pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah

menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah. Di kota Payakumbuh sendiri terdapat 13 kasus mengenai kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah, antara lain terdapat 2 kasus mengenai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 6 kasus mengenai kelemahan sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta terdapat 5 kasus mengenai kelemahan struktur pengendalian internal. Dan 17 kasus terhadap ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan, diantaranya terdapat 8 kasus tentang kerugian daerah sejumlah Rp 33.782.000.000, 1 kasus tentang potensi keuangan daerah yang hilang sejumlah Rp 390.903.000.000, dan ada 8 kasus tentang kesalahan administrasi (IHPS, 2014).

Pengendalian intern, jika tidak didukung dengan teknologi informasi belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal. Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human error*. Menurut LAKIP pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2013, menyatakan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja manajemen pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan

terjangkau serta berbasis teknologi informasi komunikasi yang diukur dengan 11 indikator mendapat predikat baik sekali.

Di kota payakumbuh sendiri, terdapat menurut laporan BPK tanggal 20 Mei 2013, saldo Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pertanian berupa ternak sapi, kambing, ikan, dan tanaman hasil pengadaan sejak Tahun 2007 sampai dengan 2009 dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan berupa buku-buku yang tidak dilakukan pencatatan secara memadai. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi. Disinilah peran aparatur sebagai sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik untuk mengelola keuangan daerah.

Dari berbagai informasi yang ada, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Sampai pada saat ini masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang belum mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Begitu juga dengan laporan keuangan pemerintahan kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, saat ini opini audit dari BPK untuk pemerintah kota Payakumbuh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang

dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang diisyaratkan, diantaranya keterandalan. Mengingat bahwa keandalan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, oleh karena itu peneliti ingin melihat kembali bagaimana pengaruh pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia pada satuan kerja perangkat daerah Kota Payakumbuh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah Kota Payakumbuh.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1) Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah?, 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?, 3) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah., 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah., 3) Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial Negara (Suwardjono, 2012:101). Laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Bagian KKAP paragraf 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelajaran.

### **Keterandalan Pelaporan keuangan Daerah**

Keterandalan pelaporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I: par. 38) merupakan kemampuan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

#### 1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

#### 2. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

#### 3. Netralitas

Informasi diserahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, lampiran II: par 35-40).

### **Pengendalian Intern**

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2005). Menurut PP 60 Tahun 2008, Tujuan pengendalian internal meliputi: (1) efektivitas dan efisiensi operasi, (2) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, serta (3) keandalan laporan keuangan.

]Pengendalian intern pemerintah merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. (Gita, 2013) menyebutkan subkomponen dari

aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Dalam Penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan

pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Selain itu, pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut model yang dikembangkan Thompson et al. (1991) dalam Tjhai (2003:5), yang mengadopsi sebagian teori yang diusulkan oleh Trandis (1980), dalam Astuti dan I ketut (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor social;
2. *Affect* (perasaan individu);
3. Kesesuaian tugas;
4. Konsekuensi jangka panjang;
5. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi;
6. Kompleksitas

### **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Hullah, 2012). Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang

cukup memadai (Alimbudiono, 2004 dalam Febriandy, 2013). Dan juga (Zetra 2009, dalam Febriandy, 2013) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya yang kualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008:48).

Untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut (Alimbudiono dan Fidelis 2004, dalam Joe Sugandi, 2013). Deskripsi jabatan merupakan

dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kualitas merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Zuliarti, 2012).

Faktor manusia merupakan sumber daya sebagai titik sentral berpikir, perencanaan, perekayasa, perancang bangunan dan pelaksana ataupun penyelenggara pembangunan dan atau pelaku pembangunan. Pendapat lain mengatakan bahwa Sumber Daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi yakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain sumber daya manusia merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi (Martoyo, 1992:2 dalam Tantriani, 2012).

Sumber daya manusia yang dimaksud disini secara khusus adalah aparat-aparat pemerintah. Aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu

organisasi pemerintahan daerah. Oleh sebab itu pengembangan sumber daya manusia (dalam hal ini aparatur pemerintah), dimaksudkan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja serta profesionalisme.

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar laporan keuangan yang disusun baik dan andal. Sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah harus lah berkualitas dan independen serta mampu bertanggungjawab atas laporan yang telah disusunnya.

#### **Pengaruh pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah**

Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinyakecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Noviyanti 2004). Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*).

Penelitian ini di dukung oleh Kadek hengki primayana (2014) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan tinjauan dan hasil penelitian sebelumnya tentang pentingnya pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1** : Pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah**

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009). Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Dengan adanya teknologi informasi ini dapat membantu Pegawai-pegawai pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah serta memudahkan dalam memproses, mengolah, dan menyimpan data keuangan secara sistematis. Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu

menyajikan laporan keuangan daerah yang andal. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Kadek hengki primayana (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2** : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah**

Penyusunan Pelaporan keuangan pemerintah daerah harus disusun oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten agar laporan keuangannya relevan dan handal. Sumber daya manusia adalah faktor paling penting yang mempengaruhi kenadalan pelaporan keuangan pemerintah. Sumber daya manusia yang ada pada organisasi publik yaitu pada pemerintahan harus memiliki kualitas untuk melaksanakan sistem akuntansi. Jika sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak berkualitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem informasi yang kualitasnya bisa menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keterandalan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Bukti penelitian ini didukung oleh

penelitian Celviana winidyaningrum (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3** : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh tahun 2015 objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh sebanyak 25 SKPD. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang menjadi pelaksana pengelola keuangan langsung yaitu, Kepala SKPD, Kasubag keuangan dan Bendahara SKPD di pemerintah daerah Kota Payakumbuh.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber ahli. Data ini diperoleh dari hasil jawaban para responden atas kuesioner yang diajukan dimana responden diperkenankan memberikan jawaban yang dianggap paling sesuai dalam bentuk pertanyaan tertulis. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program komputer



*Statistical Product And Service Solution (SPSS) versi 20,0.*

Variabel Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah

Variabel Keterandalan merupakan kemampuan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Konstruksi Nilai informasi Keandalan dapat diukur dengan 3 indikator, yaitu kewajaran, kelengkapan unsur laporan dan generalisasi.

Variabel Pengendalian Intern Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2001 pada SA seksi 319 par 06 mengartikan pengendalian intern sebagai berikut:

“Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. Variabel pengendalian intern diukur dengan instrument yang dikembangkan oleh Indiasari dan Nahartyo (2008) dengan 9 item pertanyaan.

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari computer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi

(Wilkinson *et al*, 2000 dalam Gita, 2013). Beberapa indikator pada teknologi informasi dapat diukur dengan 3 indikator yaitu, pengolahan data keuangan, perangkat dan perawatan.

Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Indikator konstruksi Sumber Daya Manusia yaitu, kapasitas staf, tupoksi dan pengembangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara masing-masing skor item instrument dengan skor total. Uji validitas data dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$  dengan  $df$  =  $63-2$  = 61 dengan tingkat signifikansi 5%. Nilai  $r$  tabel dengan derajat bebas ( $df$ ) 61 adalah 0,248.

### Hasil Uji Reabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.

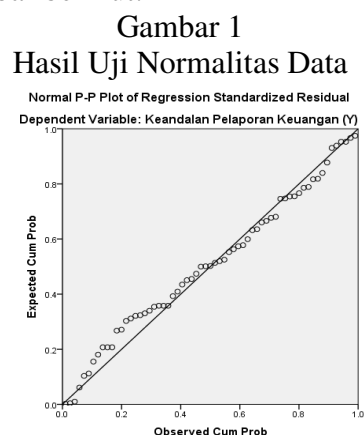
Tabel 1  
Hasil Uji Reliabilitas Data

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Y)	0,925	Reliabel
2	Pengendalian Intern (X1)	0,852	Reliabel
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,836	Reliabel
4	Kualitas Sumber Daya Manusia (X3)	0,915	Reliabel

Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

### Hasil Uji Normalitas Data

Hasil pengujian normalitas data dengan *P-P Plot* untuk variabel dependen (Y) keandalan pelaporan keuangan daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

Dari grafik *P-P Plot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

### Hasil Uji Multikolinieritas Data

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2  
Hasil Uji Multikolinieritas Data

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Pengendalian Intern (X1)	0,798	1,268	Bebas Multikolinieritas
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,779	1,284	
3	Kualitas Sumber Daya Manusia (X3)	0,986	1,104	

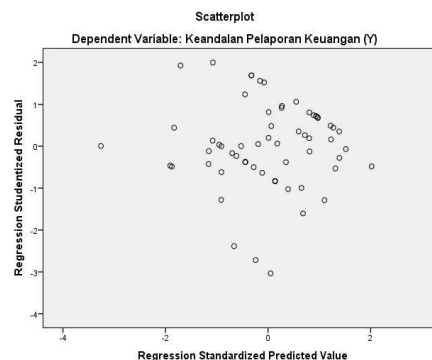
Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

Dari tabel dapat diketahui bahwa keempat variabel ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2  
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Autokorelasi

Untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3  
Hasil uji autokorelasi

No	Variabel	Durbin - Watson	Keterangan
1	Pengendalian Intern (X1)	1.617	Tidak terdapat auto korelasi
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)		
3	Kualitas Sumber Daya Manusia (X3)		

Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

Dari tabel dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* pada variabel independen dan variabel dependen menunjukkan nilai 1,617. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4  
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	-1.899	5.597		-.339	.736		
1 Pengendalian Intern (X1)	.645	.144	.513	4.481	.000	.789	1.268
1 Teknologi Informasi (X2)	.105	.119	.101	.878	.383	.779	1.284
1 Sumber Daya Manusia (X3)	.215	.074	.297	2.895	.005	.986	1.014

a. Dependent Variable: Keandalan Pelaporan Keuangan (Y)

Sumber : data olahan SPSS 20.0, 2015

### Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh. Dari Tabel dapat diketahui bahwa besarnya  $t_{hitung}$  adalah 4,481 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  adalah 2,001. Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,000 dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,481 > 2,001$ ) dan  $sig. < 0,000 < 0,005$ . Dengan demikian variabel pengendalian intern secara parsial berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan

daerah pada pemerintah kota Payakumbuh.

Hasil penelitian ini didukung oleh literatur yang berkaitan dengan pengaruh pengendalian intern terhadap keterandalan laporan keuangan daerah. Seperti yang diamanatkan dalam pasal 59 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan kepala satuan perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah disesuaikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Shinta (2014), dan Febriady (2013) yang menemukan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian intern yang diterapkan di setiap unit pemerintahan maka keterandalan laporan keuangan daerah juga semakin baik, sebaliknya semakin buruk pengendalian intern yang diterapkan maka keterandalan laporan keuangan daerah juga akan semakin buruk.

#### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah kota Payakumbuh. Dari Tabel

dapat diketahui bahwa besarnya  $t$  hitung adalah 0,878 sedangkan nilai  $t$  tabel adalah 2,001. Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,383 dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga  $t_{tabel} < t_{hitung}$  ( $0,878 < 2,001$ ) dan  $sig. 0,383 > 0,05$ . Dengan demikian variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gita silvia (2013) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan daerah. Dengan demikian, keterandalan pelaporan keuangan tidak sepenuhnya didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk membuat suatu laporan yang benar dan valid serta bebas dari salah saji material agar tidak menyesatkan.

#### **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh. Dari Tabel dapat diketahui bahwa besarnya  $t$  hitung adalah 2,138 sedangkan nilai  $t$  tabel adalah 2,001. Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,005 dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga  $t_{tabel} > t_{hitung}$  ( $2,895 > 2,001$ ) dan  $sig. 0,005 < 0,05$ . Dengan demikian variabel Kualitas Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan

Daerah pada pemerintah Kota Payakumbuh.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh (Warisno 2008:48) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada, serta sumber daya manusia akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Celviana (2010) dan Darwanis (2009) yang membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia, maka akan diikuti dengan peningkatan informasi yang memiliki nilai dalam pelaporannya, yaitu keterandalan dalam pelaporan keuangan.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5  
Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.624 <sup>a</sup>	.390	.359	3.28614	1.617

Sumber: data olahan SPSS 20.0, 2015

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai pengaruh pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0.624 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah atau SKPD memiliki hubungan sebesar 62,4%. Sedangkan nilai *Adjusted Rsquare* 0.359 yang berarti bahwa variabel dependen (keterandalan pelaporan keuangan daerah) mampu dijelaskan oleh variabel *independen* (pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia) sebesar 35,9% dan selebihnya 64,1% (100%-35,9% = 64,1%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran agar pemerintah kota Payakumbuh lebih meningkatkan lagi pertanggung-

jawabannya dalam mengelola keuangan daerah dengan cara meningkatkan pemahaman tentang pengawasan/pengendalian penyajian keuangan daerah dalam menggunakan dan menyusun pelaporan keuangan serta lebih transparansi tentang laporan keuangan daerah dengan cara mengakses laporan keuangan daerah agar pihak yang berkepentingan dan masyarakat bisa melihat serta mengetahui hasil kinerja dari setiap unit-unit SKPD atau pemerintah daerahnya. Dengan demikian akan tercapainya *good governance* (pemerintahan yang baik sesuai amanat rakyat).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra dan Arastyo Andono Fidelis. 2004. “Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume 05 Nomor 02: Halaman 18–30.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. *Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014*. (<http://www.bpk.go.id/>).
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: BPFE Yogyakarta.
- Erlina dan Sri Mulyani. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Edisi ke Kedua, Penerbit USU Press, MEDAN.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*.
- Hamzah, Ardi. 2009. “Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura)”, Kumpulan Makalah Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hullah, A. R., S. Pangemanan, S. Tangkuman dan N. Budiarmo. 2012. “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara”, Jurnal Riset Akuntansi, Vol 3 – No 2: Halaman 9-21.
- Indriasari Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh*

- Kapasitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, dan Pengendalian intern akuntansi Terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.* SNA XI. Pontianak.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh (LAKIP) Tahun 2013.
- Leonard Sembiring, Febriandy. 2013. *Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah Kota Padang).* Jurnal Akuntansi.
- Marda, Silvia Gita. 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah, Studi pada pemerintah Kota Dumai.* Jurnal Akuntansi.
- Mulyadi. 2005. "Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa", Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE.
- Noviyanti, Suzy dan Intiyas Utami. 2004. "Dasar-Dasar Pengauditan", Salatiga: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Primayana kadek hengki, Anantawikrama, Nyoman. 2014. *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ( survey di wilayah keresidenan Surakarta).* Jurnal akuntansi, Vol 2 No.1.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Siregar, astuti handayani. I ketut suryanawa. 2009. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Individual Pada KPP Denpasar Barat.* Jurnal akuntansi dan bisnis. Vol 4, No.2 Juli 2009.
- Warisno. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi.* Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

